

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-1 Bulan Desember 2021 (tanggal 26 November s.d. 2 Desember)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ANTISIPASI PERMASALAHAN SOSIAL PASCA-PON XX PAPUA

Lukman Nul Hakim
Peneliti Muda/Bidang Psikologi
lukman.nulhakim@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Rangkaian kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI telah berakhir pada 13 November 2021. PON XX Papua dan Peparnas XVI mendapatkan pujian dari berbagai kalangan karena telah berjalan lancar dan pecahnya beberapa rekor. Namun demikian, dibalik kesuksesan tersebut ternyata terdapat banyak permasalahan yang muncul pasca-terselenggaranya kegiatan, terutama tentang pembayaran kepada pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan penelusuran melalui media online dan komunikasi dengan pihak yang terlibat langsung dalam perhelatan PON XX tersebut, beberapa permasalahan yang belum terselesaikan adalah pembayaran atas penggunaan hak ulayat milik masyarakat adat yang digunakan untuk pembangunan venue PON XX Papua, honor relawan, honor tenaga medis, honor kru media center, dan pembayaran rental mobil.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi menyampaikan, sebelum penyelenggaraan PON XX ada masyarakat yang menolak digunakannya hak ulayat tanah masyarakat adat, namun demikian dengan adanya pendekatan dari Kapolda Papua yang memberikan jaminan penyelesaian ganti rugi akhirnya masyarakat memperbolehkan. Namun demikian janji tersebut belum terealisasi.

Keluhan juga datang dari ratusan sopir rental yang tergabung dalam Bidang Transportasi Lintas Papua yang belum mendapatkan haknya. Padahal biaya operasional pada saat PON XX seperti bahan bakar dan konsumsi menggunakan uang pribadi mereka terlebih dahulu.

Protes masalah keuangan juga disampaikan oleh para wartawan di Kabupaten Jayapura. Karena panitia PON XX dan Peparnas XVI belum juga membayar hutang pelatihan teknis jurnalis peliput PON XX yang telah dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2021 di Hotel Grand Allison Sentani. Pelatihan tersebut melibatkan 60 orang wartawan, narasumber dan panitia.

Permasalahan serupa juga disuarakan oleh Ketua Koordinator Aksi Wartawan Media Center PON XX Papua, Eko Paul Andhika Weriditi yang menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal 30 November 2021 mereka belum juga menerima honor kerja. Eko yang memimpin 67 orang wartawan mengatakan, perjanjian kerja pun berubah-ubah, dari yang awalnya dijanjikan akan diberikan 10 bulan gaji kemudian diralat menjadi diberikan honor sesuai jumlah hari kerja. Pada surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Panitia Besar PON XX Papua dan wartawan dituliskan bahwa perjanjian kerja antara wartawan dan panitia tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021, dengan pihak Panitia berkewajiban memberikan honor/insentif sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per hari/kegiatan selama 17 hari kerja.

Sejauh ini pihak-pihak yang terkena dampak telah melakukan aksi protes turun ke jalan. Pada hari Jumat 29 November 2021 ratusan relawan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Otonom Provinsi Papua di Jalan Kotaraja-Entrop, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. Para pendemo bahkan melakukan aksi pembakaran sejumlah benda di jalan dan memalang gerbang utama jalan masuk kantor tersebut. Sementara Wartawan Media Center PON XX Papua rencananya akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

SUMBER

Ceritadepok.com, 30 November 2021; Kabarpapua, 30 November 2021; Merdeka.com, 30 Oktober 2021; Papua.us, 13 September 2021; Sindonews.com, 30 November 2021.